



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



LAPORAN KINERJA

**DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai media informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPIP tahun 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dimana akuntabilitas menjadi komitmen Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya. Laporan kinerja ini menjabarkan tentang target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja, tingkat capaian program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 mampu menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di masa depan.

Jakarta, Januari 2021

Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi., Psikolog`

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM.....	2
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5. Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja	11
2.3. Perjanjian Kinerja.....	12
2.4. Pengukuran Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja.....	14
3.2. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020.....	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	13
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas	15
Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas	17
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	18
Tabel 6. Capaian Kinerja Persentase Diklat PIP yang Melakukan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Komunitasnya.....	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT.....	20
Tabel 8. Capaian Kinerja Sarana Diklat PIP yang Dimanfaatkan.....	21
Tabel 9. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	24
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kerja Sama dan Perencanaan Tahun 2020	26
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktur Standardisasi dan Kurikulum Diklat Tahun 2020	28
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	30
Lampiran 5. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Kerja Sama dan Perencanaan Tahun 2020	32
Lampiran 6. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat Tahun 2020	40
Lampiran 7. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2020.

Laporan kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan disusun sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan serta masyarakat. Laporan kinerja yang akuntabel adalah salah satu wujud komitmen Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumber daya dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 telah melaksanakan program kerja dan pengelolaan seluruh sumber daya, serta seluruh tahapan proses penyelenggaraan program diklat sesuai standar proses dalam Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan program-program jangka menengah BPIP, khususnya program diklat PIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2020 - 2024.

Pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan, dan indikator kinerja (*performance indicator*) pada masing-masing indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan *e-monev* Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2020

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan beberapa sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti	100% 3 Dokumen	100% 3 Dokumen	100%
			Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	100%	100 %
			Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40%	95%	238 %
			Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT	75%	0 orang	0 %
			Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket	1 paket	0 %

Capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, dengan capaian rata-rata 87,60 % dari target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan, serta kerja sama pelaksanaan diklat antara BPIP dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan komunitas, serta pelaksanaan kegiatan diklat PIP bagi lembaga pendidikan formal dan informal. Namun, masih terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT sampai dengan akhir periode pengukuran dengan target kinerja sebesar 75% dan sarana diklat PIP yang dimanfaatkan dengan target kinerja 1 paket belum tercapai. Belum tercapainya indikator kinerja ini

disebabkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Upaya peningkatan kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inklusivisme sosial, pelebagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi.

Laporan kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan disusun sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan serta masyarakat. Laporan kinerja yang akuntabel adalah salah satu wujud komitmen Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumber daya dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada akhir periode pengukuran.

Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja dan pengelolaan seluruh sumber daya dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan program diklat sesuai standar proses dalam Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan program-program jangka menengah BPJP, khususnya program diklat PIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPJP tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan BPJP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024.

Sehubungan hal tersebut, penyusunan laporan kinerja ini akan memberikan gambaran tentang kondisi obyektif Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 148 (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.

Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.3. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

1.3.1 Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan

Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 3 (tiga) subdirektorat, yaitu:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan I;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II;
- c. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 3 (tiga) subdirektorat, yaitu:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan I;
- b. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan II;
- c. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.3 Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 3 (tiga) subdirektorat, yaitu:

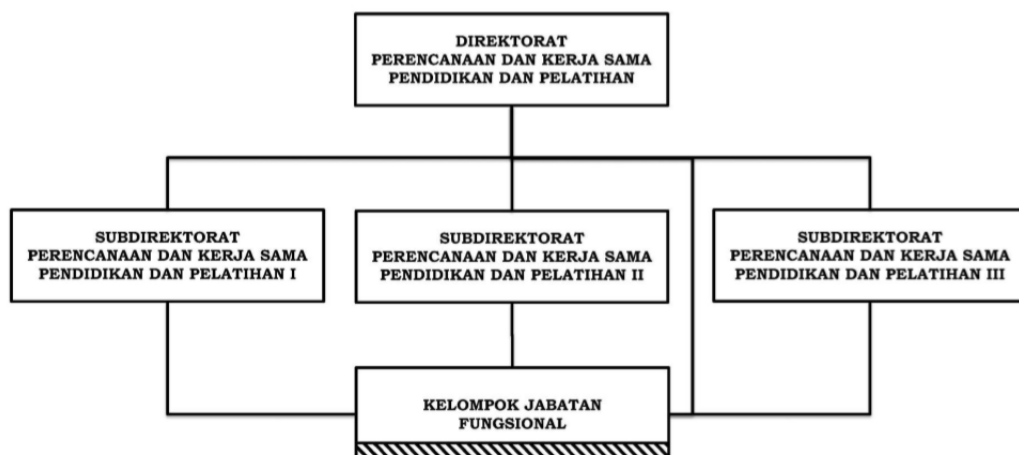
- a. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- c. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal dan Informal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana terdapat pada Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Struktur organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 2. di bawah ini.



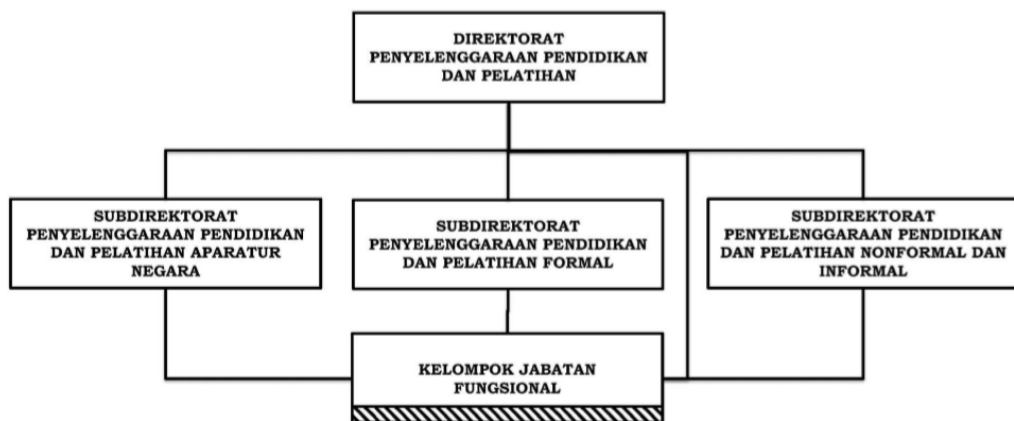
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 3. di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 4. di bawah ini.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Sampai dengan akhir tahun 2020, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh SDM sebanyak 20 orang, terdiri dari: 1 orang Pejabat Tinggi Madya, 2 orang Pejabat Tinggi Pratama, 8 orang Pejabat Administrator, 9 orang staf, dan 6 CPNS (3 analis dan 3 pranata) dengan tingkat pendidikan terakhir S-3= 2 orang, S-2=9 orang, S-1=12 orang, D-3=3 orang.

1.4. Aspek Strategis Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa oleh para pendiri Bangsa, niscaya diperjuangkan secara berkelanjutan agar menjadi realita di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan rumusan ideologi bangsa yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut dikristalisasi menjadi 5 pokok inti

dari Pancasila yang mencerminkan ciri kehidupan bangsa Indonesia yaitu: (1) KeTuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya di dalam pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mulai menjauh dari kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi dan tantangan perkembangan zaman yang menggerus eksistensi nilai-nilai seperti: globalisasi, eksklusivisme, kesenjangan sosial ekonomi, dan ancaman pengucilan sosial. Kondisi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu dalam pembinaan ideologi Pancasila saat ini yakni, kurangnya pemahaman tentang Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarustamakannya keteladanan Pancasila.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini mempunyai peran strategis melalui penyelenggaraan program yang efektif dan efisien dalam melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi dengan baik dengan menggunakan standar dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

1.5. Isu Strategis Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Rencana strategis BPIP tahun 2018-2023 telah mengidentifikasi isu strategis dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis baik lingkungan strategis internal maupun eksternal, maka isu yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu: kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarustamakannya keteladanan Pancasila.

Berdasarkan 5 (lima) isu strategis tersebut, terdapat beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan antara lain :

- a. intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
- b. kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- c. rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
- d. pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; dan
- e. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Selain itu, agar program pembinaan ideologi Pancasila dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu, maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (Roadmap), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP. Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020 –2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP.

Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah lembaga yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Situasi kekinian yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra BPIP antara lain: (1) Instruksi Presiden kepada BPIP dalam Presidential Lecture yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019; (2) program pemerintah yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara; (3) pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul; (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0 berupa internet of things, artificial intelligence, dan big data; serta (5) kondisi geopolitik global akibat globalisasi.

BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara, komponen bangsa, maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 (tujuh) agenda pembangunan butir ke-4 (empat). Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan. Hakikat pengembangan pembinaan ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (fairness), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra BPIP merupakan penjabaran dari visi, misi, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesis dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan.

Memedomani potensi serta sejumlah tantangan di kurun waktu 2020-2024 sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka BPIP menetapkan penyesuaian visi kelembagaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di lima tahun mendatang, guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi BPIP ditetapkan sebagai berikut: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ditetapkan sebagai berikut: BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPIP yakni terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.1 Visi

Berdasarkan rumusan misi BPIP tersebut, maka Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai visi sebagai berikut: “Mendukung pencapaian misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mewujudkan misi Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila”.

2.1.2 Misi

Dalam upaya mendukung pencapaian visi ke deputian yang telah ditetapkan, Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan menetapkan misi yang menjadi landasan dalam perumusan program kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

2.1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah tercapainya:

- a. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

2.1.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, Orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, Orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.

2.2. Rencana Kinerja

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan target sasaran program adalah terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal. Sasaran program tersebut adalah untuk mendukung pencapaian sasaran program BPIP yakni penyelenggaraan diklat PIP dengan target sasaran program sebagai berikut :

- a. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti (100%);
- b. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP (100%);
- c. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya (40%);
- d. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT (75%); dan
- e. Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan (1 Paket).

Target dan sasaran program tersebut dihasilkan dari beberapa kegiatan utama dengan sasaran dan indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP, dengan sasaran kegiatan terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP;
- b. Penyusunan Standardisasi dan kurikulum Diklat PIP, dengan sasaran kegiatan terlaksananya standardisasi dan kurikulum Diklat PIP untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III;
- c. Penyelenggaraan Diklat PIP, dengan sasaran kegiatan terdiri atas:
 - 1) Terlaksananya layanan penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal;

- 2) Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan PIP;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP.

2.3. Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 menetapkan target indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja untuk tingkat kegiatan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1.	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	1. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti	100%
			2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%
			3. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40%
			4. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT	75%
			5. Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket

2.4. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang diolah dari data Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020, diperoleh hasil capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti	100% 3 Dokumen	3 Dokumen	100%
			Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	100%	100%
			Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40%	95.85%	239.63%
			Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT	75%	0 orang	0 %
			Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket	1 paket	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan, dan indikator kinerja (*performance indicator*) pada masing-masing indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan *e-monev* Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2020 Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagian besar telah berhasil merealisasikan seluruh sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2020.

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan juga melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPIP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2020 dapat tercapai. Capaian Kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis tahun 2020 pada Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terdapat pada Tabel 3, 4, dan 5 di bawah ini.

Indikator Kinerja-1: Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, pada sasaran program terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal, dengan indikator kinerja persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti, diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Persentase Hasil Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP yang Ditindaklanjuti

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %

Perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen perencanaan kerja sama diklat PIP yang disusun pada tahun 2020 dengan jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2020, diperoleh capaian kinerja pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100 %.

Capaian kinerja persentase hasil perencanaan dan kerja sama diklat PIP yang ditindaklanjuti berupa dokumen dengan target pada tahun 2020 sejumlah 100 % atau 3 dokumen perencanaan dan kerja sama. Realisasi perencanaan dan kerja sama diklat yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 3 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

- Perencanaan dan Kerja Sama Sistem Nasional Diklat PIP bagi Aparatur Negara.
- Perencanaan dan Kerja Sama Sistem Nasional Diklat PIP bagi Orsospol.
- Perencanaan dan Kerja Sama Sistem Nasional Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang antara lain adalah :

- Penyusunan Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi Sosial.
- Webinar Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

- d. Webinar Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda.
- e. Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- f. Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Media Massa.
- g. Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya.
- h. Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya dan Standardisasi Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya.
- i. Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Cetak Biru Sistem Nasional Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Orsospol dan Komponen Masyarakat Lainnya.
- j. Audiensi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Selatan dan Persiapan Lokakarya Nasional Sistem Nasional Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.
- k. Lokakarya Nasional Cetak Biru Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.
- l. Rapat Koordinasi Perencanaan Program Kerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021.

Meskipun pada tahun 2020 indikator kinerja ini belum dicapai, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan strategi antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan melalui daring seperti kegiatan webinar sebagai koordinasi awal dengan K/L, instansi, ataupun *stakeholder* terkait kegiatan perencanaan dan kerja sama diklat PIP.
- b. Menyusun cetak biru perencanaan dan kerja sama diklat PIP sebagai gambaran awal perencanaan dan kerja sama diklat yang akan dilaksanakan.

Indikator Kinerja-2: Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, pada sasaran program terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal, dengan indikator kinerja adalah persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP, diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Persentase Pemanfaatan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	100%	100%

Indikator kinerja utama untuk sasaran program ini adalah Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan target kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2020, diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Perhitungan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang disusun pada tahun 2020 dengan jumlah dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada akhir periode pengukuran kinerja tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah telah tersusunnya rancangan Peraturan BPPI tentang Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang antara lain adalah :

- Penyusunan Pedoman Diklat PIP bagi Generasi Milenial
- Pembuatan Pedoman Diklat PIP bagi Lembaga Pendidikan Formal
- Pembuatan Pedoman Diklat PIP bagi Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, TNI, Polri dan Pendidikan Non Formal (Ormas)
- Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Negara, TNI, dan Polri Serta Pendidikan Non Formal (Organisasi Masyarakat)
- Penyusunan Pedoman Diklat Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
- Penyusunan Pedoman Diklat Bagi Generasi Milenial, Pengajar PAUD dan Komponen Masyarakat Lainnya

Meskipun pada tahun 2020 indikator kinerja ini dapat dicapai, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan strategi antara lain:

- a. Pemantauan dan evaluasi pemanfaat standar dan kurikulum Diklat PIP pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bahan perbaikan standar dan kurikulum selanjutnya.
- b. Menyusun turunan standar dan kurikulum diklat PIP seperti Pedoman, Juknis, dan bahan ajar Diklat PIP untuk dapat digunakan dalam teknis penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

Indikator Kinerja-3: Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, pada sasaran program terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal, dengan indikator kinerja adalah persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP, diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Kinerja Persentase Diklat PIP yang Melakukan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Komunitasnya

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40%	95.85%	239.63%

Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis ini adalah terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal dengan indikator kinerja adalah Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan target kinerja sebesar 40%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2020, diperoleh capaian kinerja sebesar 95.58%.

Perhitungan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah lulusan diklat yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan jumlah peserta diklat yang mengikuti diklat PIP pada tahun 2020. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, selama tahun 2020 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berhasil merealisasikan 239.63% dari target, dimana target kinerja tahun 2020 sebesar 40% lulusan diklat yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya (87 orang), pada akhir periode pengukuran diperoleh hasil sebanyak 208 orang lulusan diklat (95.85%) dari total 217 orang peserta diklat. Realisasi ini menggambarkan bahwa seluruh proses penyelenggaraan diklat telah didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, kurikulum dan modul diklat sesuai standar.

Perhitungan capaian kinerja persentase diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya sebagaimana terdapat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Capaian Kinerja Persentase Diklat PIP yang Melakukan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Komunitasnya

No.	Nama Diklat	Jml.Peserta	Jml. Lap. Aktualisasi	%
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru Mapel PKn	116	114	98,28
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Ormas	101	94	93,07
Total		217	208	95,85

Meskipun pada tahun 2020 indikator kinerja ini dapat dicapai, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan strategi antara lain:

- Analisis kebutuhan diklat PIP pada wilayah maupun target sasaran peserta yang membutuhkan diklat PIP agar diklat PIP lebih terukur.
- Melakukan monitoring pelaksanaan aktualisasi diklat PIP melalui fasilitator diklat maupun pendamping kelas.

Indikator Kinerja-4: Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, pada sasaran program terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal, dengan indikator kinerja adalah persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT, diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Kinerja Persentase Tenaga Pengajar Diklat PIP yang Tersertifikasi ToT

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT	75%	0%	0%

Indikator kinerja utama untuk sasaran program ini adalah persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT dengan target kinerja sebesar 75%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2020, diperoleh capaian kinerja sebesar 0%. Perhitungan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah tenaga pengajar Diklat PIP dengan jumlah tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT.

Belum berhasilnya pencapaian target kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah pada tahun 2020 terdapat 2 (kali) revisi DIPA yang disebabkan oleh realokasi anggaran tahun 2020 dan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanggulangan covid-19, yang mengakibatkan penyelenggaraan diklat PIP bagi tenaga pengajar yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang mengalami penundaan.

Meskipun pada tahun 2020 indikator kinerja ini belum dapat dicapai, namun demikian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra BPIP Tahun 2020-2024 dengan target sampai dengan akhir periode renstra sebanyak 650 orang, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan strategi untuk dapat mencapai target kinerja tersebut.

Indikator Kinerja-5: Sarana Diklat PIP yang Dimanfaatkan

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, pada sasaran program terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal, dengan indikator kinerja adalah sarana diklat PIP yang dimanfaatkan, diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sarana Diklat PIP yang Dimanfaatkan

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan non formal dan informal	Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket	1 Paket	100%

Indikator kinerja utama untuk sasaran program ini adalah sarana diklat PIP yang dimanfaatkan dengan target kinerja sebesar 1 paket. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2020, diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Perhitungan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah dengan mengukur jumlah sarana dan prasarana diklat yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemda yang dimanfaatkan oleh BPIP dalam penyelenggaraan diklat PIP.

Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah pada tahun 2020 adanya kerja sama antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Kementerian ESDM, dengan pemanfaatan sarana yang dimiliki di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geominerba di Bandung, Jawa Barat untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, baik kegiatan terkait perencanaan diklat maupun penyusunan standar dan kurikulum diklat PIP.

Meskipun pada tahun 2020 indikator kinerja ini telah dapat dicapai, untuk meningkatkan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini telah dilakukan audiensi dengan beberapa kementerian/lembaga dan Pemda untuk kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan diklat PIP.

3.2. Realisasi Anggaran

Sampai dengan 31 Desember 2020, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan 3 (tiga) kegiatan utama dan 9 (sembilan) output yang bersumber dari DIPA BPIP T.A. 2020, berdasarkan data realisasi anggaran yang bersumber dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) pagu anggaran sebesar Rp.5.140.150.000, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.777.115.368 (73.50%), dengan rincian realisasi anggaran menurut output sebagaimana terdapat pada Tabel 9. di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
4186	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	5.140.150.000	3.777.115.368	73,50%
4.186.001	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat	1.353.450.000	1.117.900.399	82,60%
	Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan Kerja sama Pusat	410.575.000	406.682.500	99,05%
	Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan Kerja sama Wilayah I	284.809.000	273.754.740	96,12%
	Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan Kerja sama Wilayah II	658.066.000	437.463.159	66,48%
4.186.002	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat	903.150.000	718.163.301	79,52%
	Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi dan Kurikulum Pusat	258.053.000	247.973.401	96,09%
	Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi dan Kurikulum Wilayah I	248.987.000	232.523.500	93,39%
	Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi dan Kurikulum Wilayah II	395.660.000	300.666.400	75,99%
4.186.003	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.883.550.000	1.878.051.668	65,13%
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara	173.334.000	115.102.600	66,40%
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Formal	1.733.258.000	868.242.160	50,09%
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Nonformal Informal	976.958.000	894.706.908	91,58%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja sebagaimana terdapat pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Secara umum pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik, yang disebabkan oleh dukungan aktif segenap komponen, maka beberapa target kinerja tahun 2020 dapat dicapai.

Capaian kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, dengan capaian rata-rata 87,60 % dari target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan, serta kerja sama pelaksanaan diklat antara BPIP dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan komunitas, serta pelaksanaan kegiatan diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal dan informal. Namun, masih terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT sampai dengan akhir periode pengukuran dengan target kinerja masing-masing sebesar 100% dan 75% tidak tercapai. Belum tercapainya sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja ini disebabkan realokasi anggaran serta keterbatasan kegiatan tatap muka tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Upaya peningkatan kinerja Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inklusivisme sosial, pelebagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Baby Siti Salamah**

Jabatan : Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yudian Wahyudi**

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Yudian Wahyudi

Pihak Pertama,

Baby Siti Salamah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2021
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan/Keagamaan Nonformal dan Informal	Persentase hasil perencanaan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)	100%
	Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila	100%
	Persentase peserta Pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	45%
	Persentase tenaga pengajar Pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi (ToT)	80%
	Sarana Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1 Paket

Program : Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggaran : Rp16.000.000.000,00

Jakarta, Januari 2021

Kepala BPIP,



Yudian Wahyudi

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,



Baby Siti Salamah



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sadono Srtharjo**

Jabatan : Direktur Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Baby Siti Salamah**

Jabatan : Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Baby Siti Salamah

Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Pertama,

Sadono Srtharjo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP	Jumlah dokumen perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP	3 Dokumen

Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Strategis dan program teknis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggaran : Rp3.500.000.000,00

Jakarta, 4 Januari 2021

Deputi Bidang Pendidikan,
Dan Pelatihan,



Baby Siti Salamah

Direktur Perencanaan dan
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan,



Sadono Sriharjo



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Tri Suhartati**

Jabatan : **Plt. Direktur Standardisasi dan Kurikulum Diklat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Baby Siti Salamah**

Jabatan : **Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2021

Pihak Pertama,

Tri Suhartati

Pihak Kedua,

Baby Siti Salamah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
Terlaksananya Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP Untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III	Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	10 Dokumen

Kegiatan : Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP
Anggaran : Rp. 3.500.000.000,00

Jakarta, 1 Februari 2021

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

Plt. Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan,



Baby Siti Salamah



Tri Suhartati



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hantoro Purnomo Aji**

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Diklat Formal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Feri Devina**

Jabatan : Plt. Direktur Penyelenggaraan Diklat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Feri Devina
NIP. 197305061992022001

Hantoro Purnomo Aji
NIP. 197412092005011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Diklat PIP Bagi Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan	1 Layanan 1 Diklat

Jakarta, 15 Februari 2021

Pt. Direktur Penyelenggara
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Sub Direktorat
Pendidikan dan Pelatihan Formal



Feri Devina
NIP. 197305061992022001



Hantoro Purnomo Aji
NIP.197412092005011005

Lampiran 5. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Kerja Sama dan Perencanaan Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	BPIP	5 Maret 2020	BPIP, Kemenkumham, Kemendagri, BKN, LAN	± 35 Orang	BPIP, Kemenkumham, Kemendagri, BKN, LAN	Dokumen masukan Penyusunan Kebijakan Strategis Dan Program Teknis Perencanaan Dan Kerjasama Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp. 15.705.000
2	Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi Sosial	Aplikasi Zoom	20 Juli 2020	BPIP, Ormas, dan Universitas	± 40 Orang	BPIP, Kemdagri, Pemprov Bali, Udayana	Dokumen masukan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi Sosial	Rp. 6.200.000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Webinar Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Aplikasi Zoom	23 Juli 2020	BPIP dan LAN	± 40 Orang	BPIP, LAN	Dokumen masukan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp. 3.900.000
4	Webinar Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda	Aplikasi Zoom	24 Juli 2020	BPIP, Kemenpora, Kemenko PMK	± 40 Orang	BPIP, Kemenpora, Kemenko PMK	Dokumen masukan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp. 4.600.000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Bogor	27 s.d. 29 Juli 2020	BPIP dan LAN	± 50 Orang	BPIP, LAN	Dokumen masukan draft cetak biru Perumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp. 340.732.500
6	Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Media Massa	Aplikasi Zoom	28 Agustus 2020	BPIP, Kominfo, Dewan Pers, Universitas, dan Kesbangpol	± 40 Orang	BPIP, Kominfo, Dewan Pers, UPH, Profesional	Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Media Massa	Rp. 7.100.000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya	Aplikasi Zoom	21 September 2020	BPIP, Kemenpora, Ormas	± 40 Orang	BPIP, Pemprov Kaltim, Kemepora, Kemendikbud, Kemendes	Dokumen masukan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya	Rp. 9.600.000
8	Webinar Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya dan Standardisasi Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi	Aplikasi Zoom	5 Oktober 2020	BPIP, Kemenpora, Ormas	± 57 Orang	BPIP, Kemenparekraf, Kemenpora, Kemenko PMK	Dokumen masukan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya dan Standardisasi Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya.	Rp. 7.600.000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Komponen Masyarakat Lainnya							
9	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Cetak Biru Sistem Nasional Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Orsospol dan Komponen Masyarakat Lainnya	PPSDM Geologi, Mineral, dan Batubara Bandung	15 s.d. 17 Oktober 2020	BPIP, LAN, Kemendagri, Kemenpora, TNI, Polri, AAKI, Kemenag, Kemenkominfo, Pemprov Jabar, Pemprov DKI, Pemprov Banten, Pemkot Bandung, UNPAD, UPI, ITB, Bandung Creative Hub	74 Orang	BPIP, LAN, Kemendagri, Kemenpora, TNI, Polri, Pemprov Jabar, Kominfo, UPI, Profesional	Laporan hasil Rumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis	Rp. 259.388.740

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Audiensi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Selatan dan Persiapan Lokakarya Nasional Sistem Nasional Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Banjarbaru	1 s.d. 3 November 2020	BPIP, Pemprov Kalsel, BBPPKS Regional IV Kalsel, Kemenag, Bappeda Pemprov Kalsel	± 70 Orang	BPIP, LAN, TNI, Polri	Bahan tindak lanjut ke deputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 39.967.060

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Lokakarya Nasional Cetak Biru Sistem Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid Kalimantan Selatan	17 s.d. 20 November 2020	BPIP, Kominfo, Kemenag, LAN, TNI/Polri, Pemprov Kalsel, BBPPKS Regional IV Kalsel, Pemprov DKI Jakarta, Pemda Banjar, Kesbangpol Barito Kuala, Pemda Hulu Sungai Selatan, Pemda Hulu Sungai Utara, Kesbangpol Kab. Tapin, Pemprov Jateng, Pemprov Jabar, Kesbangpol Bali, Kesbangpol DIY, Kesbangpol Sumut, Kesbangpol Sultra, Kesbangpol NTB.	± 70 Orang	BPIP, LAN, TNI, Polri	Laporan hasil lokakarya berupa dokumen cetak biru Sisnas Diklat PIP dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang	Rp. 278.993.099

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Rapat Koordinasi Perencanaan Program Kerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	Wisma Hijau Depok	11 s.d. 13 Desember 2020	Internal Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	-	Laporan perencanaan program kerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021	Rp. 92.970.000
TOTAL								Rp. 1.066.756.399

Lampiran 6. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Pedoman Diklat PIP bagi Generasi Milenial	BPIP	12 Februari 2020	BPIP, Kemendikbud, Kemenpora	35 Orang	BPIP, Kemendikbud, Kemenpora	Dokumen masukan penyusunan pedoman Diklat PIP bagi kelompok usia milenial	Rp. 1.235.000
2	Pembuatan Pedoman Diklat PIP bagi Lembaga Pendidikan Formal	BPIP	13 Februari 2020	Internal BPIP	35 Orang	BPIP	Dokumen masukan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendidikan Formal	Rp. 11.000.000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pembuatan Pedoman Diklat PIP bagi Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, TNI, Polri dan Pendidikan Non Formal (Ormas)	BPIP	18 Febuari 2020	BPIP, Polri, Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, Kemendikbud, Kemenhan, MABESAD, dan Orsospol	35 Orang	BPIP, Polri, Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, Kemendikbud, Kemenhan, MABESAD, dan Orsospol	Dokumen masukan Penyusunan Pedoman Diklat PIP bagi Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, TNI, Polri dan Pendidikan Non Formal (Ormas)	Rp. 13.850.000
4	Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Negara, TNI, dan Polri Serta Pendidikan Non	Depok	10 s.d. 12 Maret	BPIP, Kemenkumham, Kemendagri, Kemendibud, Kominfo, Kemenpan RB, LAN, Kemendes, Kemenag, Kemenhan, Kesbangpol DKI Jakarta, IPDN, TNI, Polri, Kemenristek, Kalbis, UNJ, Orsospol	67 Orang	BPIP, Polri, LAN, Kemendagri, Kemendikbud, Profesional	Dokumen masukan Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Negara, TNI, dan Polri Serta Pendidikan Non Formal (Organisasi Kemasyarakatan)	Rp. 234.123.400

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Formal (Organisasi Kemasyarakatan)							
5	Penyusunan Pedoman Diklat Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi	Tangerang	20 s.d. 23 Juli 2020	BPIP, Kemendikbud, Kemenag	56 Orang	BPIP, Kemendikbud, Kemenag	Dokumen masukan Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi	Rp 221.523.500
6	Penyusunan Pedoman Diklat Bagi Generasi Milenial, Pengajar PAUD dan	Bandung	11 s.d. 13 November 2020	BPIP, Kesbangpol, Himpaudi, Kemenpora, BKKBN	67 Orang	BPIP, Kesbangpol, Himpaudi, Kemenpora	Dokumen masukan Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Generasi	Rp 197,014,000

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Komponen Masyarakat Lainnya						Milenial, Pengajar PAUD dan Komponen Masyarakat Lainnya	
7	Evaluasi Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	Bogor	2020 tanggal 2 s.d 4 Des 2020	BPIP	24 Orang	BPIP	Dokumen masukan evaluasi kegiatan direktorat standardisasi dan kurikulum tahun 2020	Rp 84.052.100
8	Rapat Internal Direktorat Standardisasi dan Kurikulum (8 kali)	BPIP	4, 5, 6, 9, 26, 27, 30 Nov dan 10 Des 2020	BPIP	± 15-30 Orang	-	Bahan masukan dan bahan persiapan kegiatan	Rp 11.387.500
	TOTAL							Rp. 774.185.500

Lampiran 7. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Ormas	Yogyakarta	8 s.d. 11 Juli 2020	Orsospol	99 Orang	BPIP, ICRP, Kabinrendiklat, Profesional	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 785.437.834
2	RDK Persiapan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Guru Mapel Pkn	BPIP	24 Juli 2020	BPIP, LAN, Kemenhan, MGMP Jabar	39 Orang	Kepala Bidang Akademis, LAN, Kemenhan, MGMP	Laporan Kegiatan Koordinasi	Rp. 9.590.000
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru Mapel PKn	Bogor	4 s.d. 7 Agustus 2020	Guru Mapel PPKn	116 Orang	BPIP, ICRP, Kabinrendiklat, Profesional	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan sejumlah 114 peserta	Rp. 851.678.160

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	PESERTA	JUMLAH PESERTA	NARASUMBER	OUTPUT	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar (Training for Trainers)	Bogor	2 s.d. 4 Desember 2020	BPIP	20 Orang	BPIP, LAN Kemhan dan Profesional	Dokumen Evaluasi Diklat	Rp 67.354.500
	TOTAL							Rp. 1.714.060.494